

Transformasi Konflik Kebijakan Relokasi Pasar Kota Ke Pasar Wisata Oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

¹Laily Rahma Agustina, ²Maya Puji Lestari, ³Juwita Wantika,
⁴Afifatul Magfiroh, ⁵Hana Pertiwi

¹²³ Program Studi Administrasi Publik, Universitas Bojonegoro
Email: Lailyrahma058@gmail.com¹

ABSTRAK

Kebijakan relokasi pasar kota ke pasar wisata untuk memenuhi tuntutan atau kepentingan perekonomian masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan yang lebih besar. Pemerintah sebagai pelayanan publik berupaya memberikan manfaat publik yang positif bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan memberikan alternatif solusi terhadap konflik kebijakan relokasi antara pedagang pasar kota dan pemerintah Bojonegoro. Teori transformasi konflik digunakan untuk mengatasi masalah dan membangun kemitraan jangka panjang yang positif. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Data diperoleh dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pengalihan pasar kota ke pasar wisata Bojonegoro ditolak oleh para pedagang pasar kota dengan alasan akan mempengaruhi pendapatan mereka. Upaya menjamin keberhasilan strategi relokasi, menggunakan teori transformasi konflik, yaitu dengan cara berkolaborasi dengan para pedagang untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam pelatihan pemasaran media digital, berkomunikasi secara efektif dengan mengadakan pertemuan dengan para pedagang pasar kota, dan memberikan bantuan dalam menciptakan keamanan dan ketertiban yakni patroli rutin dan aduan masyarakat ke Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro. Pada akhirnya setelah penetapan, para pedagang beralih ke Pasar Wisata, menyadari manfaatnya dengan mendapatkan hasil berupa peningkatan pendapatan hingga 50% dari sebelumnya. Konsumen merasa nyaman, aman, dan bersemangat berbelanja di Pasar Wisata berkat fasilitas yang memadai.

Kata kunci: Pedagang; Relokasi; Transformasi

PENDAHULUAN

Transformasi konflik menurut John Paul Lederach adalah suatu upaya untuk membantu mengatasi konflik antar golongan agar melihat kondisi dengan lebih konstruktif. Proses penyelesaian tersebut akan lebih mengarah pada perubahan sistemik. Sehingga, arah dari penyelesaian konflik akan menuju sistem perdamaian. John Paul Lederach adalah pakar transformasi konflik yang percaya bahwa segala sesuatu yang dapat memperpanjang konflik dan menimbulkan kerugian harus diubah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Tujuan transformasi konstruktif adalah beralih dari sikap negatif ke positif terhadap konflik dengan menyadari bahwa hal itu menguntungkan suatu hubungan. Dalam artikel Michael Maise, proses perubahan konflik yang konstruktif disebut sebagai transformasi konflik. (Anastasia N, A dkk, 2013)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri, pasar merupakan lokasi di mana penjual dan pembeli bertemu untuk bertransaksi dan juga sebagai tempat untuk interaksi sosial, budaya, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pasar merupakan faktor ekonomi yang dapat memberikan manfaat dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pasar berkembang menjadi dua jenis: pasar tradisional (lokal) dan pasar modern (wisata). (Pemendagri, 2017)

Pasar tradisional adalah pasar yang didirikan dan dijalankan oleh pemerintah, perusahaan swasta, koperasi, atau masyarakat lokal, dengan berbagai jenis tempat usaha seperti toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh kelompok kecil dan pedagang menengah dengan skala usaha kecil dan modal kecil, serta jual beli dilakukan melalui tawar-menawar. Permasalahan umum yang sering dihadapi oleh pasar tradisional meliputi jumlah pedagang yang berlebihan, suasana pasar yang terlihat kumuh, kurangnya kesadaran pedagang terhadap pengaturan area, dan kebersihan dagangan makanan siap saji yang dipertanyakan. (Sugiyanto, 2009)

Sedangkan pasar modern/wisata adalah pasar yang didirikan oleh pemerintah atau swasta, dengan administrasi kekinian dan fokus pada pelayanan belanja yang nyaman. Biasanya ditemukan di wilayah metropolitan, sebagai penyedia barang dan jasa berkualitas tinggi kepada konsumen. Hal ini yang menjadikan Pasar modern diminati karena menawarkan jaminan kualitas, kebersihan, dan keamanan yang baik. Pasar wisata ini lebih bersih, teratur, menyenangkan, dan aman, dengan pedagang yang senang berinteraksi dengan pemasok besar. (Manzanaris, 2018)

Maka dari itu, berdasarkan sejumlah tanda yang menunjukkan masalah di pasar tradisional, pemerintah sering kali mengadopsi kebijakan untuk memindahkan pasar tradisional guna memperbaiki situasinya, mengklarifikasi peran pasar, serta mematuhi regulasi pemerintah yang berlaku. Secara keseluruhan, kebijakan relokasi pasar tradisional memiliki efek serupa dengan kebijakan lainnya, baik yang bersifat positif maupun negatif. Efek positifnya mencakup manfaat yang diantisipasi dari kebijakan tersebut, seperti mengurangi kemacetan dengan memindahkan pasar ke lokasi yang lebih ramah lingkungan dan memiliki akses jalan yang lebih besar. Namun, ada juga efek negatifnya, seperti kerugian yang dialami pedagang ketika pasar dipindahkan ke lokasi yang kurang diminati, sehingga mengakibatkan berkurangnya jumlah pelanggan.

Kabupaten Bojonegoro memiliki pasar tradisional yang telah beroperasi selama puluhan tahun serta mempunyai nilai-nilai historis tersendiri dibandingkan pasar tradisional lain yang ada di Bojonegoro yaitu pasar kota. Pasar Kota beralamat di Jl. Jaksa Agung Suprpto, Banjarjo, Bojonegoro. Pasar Kota yang dulunya bernama pasar Banjarjo ini juga sempat dilakukan revitalisasi total baik bentuk bangunan maupun jumlah toko dan kios, hingga saat ini pasar Banjarjo berganti nama menjadi Pasar Kota Bojonegoro. (Siska Perbapo, 2022)

Sementara pada tahun 2021, Pemkab Bojonegoro mendirikan Pasar Wisata di Jl. Koprak Kasan. Pasar wisata Bojonegoro ini terletak di antara pasar kota Banjarjo, pasar modern KDS, dan supermarket Bravo dengan jarak kurang dari 200 meter. Pasar wisata Bojonegoro bersifat semi modern, berlantai 2 dan memiliki sekitar 1.700 toko dan stand. Dilengkapi dengan fasilitas yang dibutuhkan pasar itu sendiri. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro merencanakan yang menempati pasar wisata adalah: (1) 1.285 pedagang dari pedagang pasar kota Bojonegoro (2) sekitar 400 pedagang untuk pedagang lesehan sore dan malam hari, dan (3) pedagang kaki lima serta pedagang eks TBS yang berjumlah kurang lebih dari 100 pedagang. (Agus Mujiono., 2022)

Kemudian, Pada tahun 2022, Pemerintah Bojonegoro mengumumkan kebijakan untuk memindahkan pasar kota ke lokasi wisata, sesuai dengan regulasi lokal seperti Peraturan Daerah Provinsi (PERDA) Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2021 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bojonegoro periode 2021-2041 dan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat, Toko Swalayan, dan Pusat Perbelanjaan. (Pemkab Bojonegoro, 2021)

Dari Kebijakan relokasi pasar dari pasar kota ke pasar wisata Bojonegoro telah menghasilkan efek yang diantisipasi dan tidak diantisipasi sebelumnya. Salah satu dampak yang diharapkan adalah mengurangi kemacetan di area pasar kota. Selain itu, pasar wisata juga memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dengan memfasilitasi kegiatan jual beli dalam lingkungan yang semi-modern, meskipun fasilitasnya masih perlu ditingkatkan untuk mendukungnya secara optimal. Sedangkan dampak yang tidak diharapkan antara lain sejumlah permasalahan masyarakat yang berkaitan dengan tujuan kebijakan atau kelompok sasaran seperti banyak dari pedagang menolak jika direlokasi ke pasar wisata. Sehingga mengakibatkan konflik antara pemerintah Bojonegoro dengan para pedagang di pasar kota di dalam mencapai kesepakatan terkait pemindahan.

Upaya menjamin keberhasilan kebijakan relokasi pasar kota Bojonegoro bisa diimplementasikan melalui penerapan metode transformasi konflik sebagai upaya penyelesaian

konflik yang membangun antara pemerintah setempat dan para pedagang kaki lima. Upaya pembenahan kawasan pasar kota dan memberikan keadilan yang selayaknya bagi pedagang pasar kota tentu memerlukan strategi yang komprehensif untuk mengatasi penyebab utama konflik.

Transformasi konflik memandang pasang surut konflik masyarakat sebagai peluang besar untuk memulai proses perubahan yang konkret. Transformasi konflik digunakan untuk meminimalkan adanya kekerasan, menumbuhkan keadilan dalam hubungan dan institusi masyarakat, dan memikirkan situasi pada dunia nyata. Untuk mencapai perdamaian dan kemampuan untuk menyelesaikan konflik secara kreatif dan tanpa menggunakan kekerasan merupakan prioritas dari transformasi konflik. (Eka Septian, 2022)

KAJIAN PUSTAKA

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Weng & Kim, 2016) bahwa organisasi pedagang kaki lima memainkan peran penting dalam keberhasilan relokasi pedagang ke gedung pasar. Keberhasilan kebijakan relokasi bergantung pada pembangunan dan pengelolaan bangunan, negosiasi konsesi, desain ulang bangunan pasar, dan penerapan pendekatan Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS). Sementara itu, lokasi yang salah, prosedur birokrasi, dan kurangnya daya tarik wisata menjadi penyebab utama kegagalan relokasi.

Sementara hasil penelitian (Zamahsari, A., 2017) adalah: 1) Kurang terjalannya komunikasi antara Satpol PP, Dinas UMKM, Pemerintah Daerah (PEMDA), dan pedagang kaki lima. 2) Organisasi pedagang kaki lima Pasar Tanah Abang kurang memperhatikan keberagaman masyarakat. 3) Belum ada kemajuan dalam upaya penertiban, relokasi, pendataan, pendampingan, dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Pasar Tanah Abang. 4) Menangani pedagang kaki lima di Pasar Tanah Abang merupakan tantangan karena adanya kesenjangan ekonomi di setiap zona. 5) Menerapkan Kebijakan Pemerintah Daerah Pengendalian pedagang kaki lima belum terbukti berhasil. Hal ini terlihat dari banyaknya pedagang kaki lima yang mendirikan toko di lokasi yang tidak tepat.

Hasil penelitian (Sukmana & Safitri, 2010) juga menunjukkan bahwa perpindahan dapat menyebabkan pelanggan merasa tidak puas, pedagang sengaja mengosongkan gerainya, pemeliharaan infrastruktur yang buruk, dan periklanan yang tidak efektif. Fakta bahwa langkah tersebut dilakukan selama wabah COVID-19 memperburuk masalah. Pedagang kecil sektor informal yang mengandalkan kunjungan wisatawan untuk mendapatkan pendapatan adalah pihak yang paling menderita akibat wabah COVID-19.

Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis bermaksud menerapkan teori transformasi konflik untuk mengkaji kesulitan dan penyelesaian konflik dalam kebijakan relokasi pasar kota ke pasar wisata Bojonegoro. Transformasi konflik adalah pendekatan pemecahan masalah multidimensi. Model ini tidak hanya menawarkan solusi langsung terhadap permasalahan yang ada saat ini, namun juga mencakup teknik penyelesaian konflik secara menyeluruh. Transformasi konflik dapat mengidentifikasi permasalahan mendasar, seperti konteks pola relasional, dan mengatasinya melalui kemitraan berkelanjutan. Upaya untuk mengubah pengaruh negatif menjadi positif akan meningkatkan hubungan antara pemerintah Bojonegoro dan pedagang pasar kota. Penataan pasar wisata sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan pedagang dan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik studi kasus. Menurut Kayin dalam (Kadji, 2016) bahwa Studi kasus adalah teknik yang lebih baik untuk mengeksplorasi isu-isu yang mempertanyakan “bagaimana” atau “mengapa”. Sementara itu, Neuman mendefinisikan studi kasus sebagai penyelidikan terperinci atas berbagai bentuk data yang berkenaan dengan beberapa unit atau kejadian dalam satu atau beberapa periode waktu.

(Neuman, 2017). Teknik ini memerlukan pengumpulan informasi dari berbagai sumber termasuk wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang kasus yang diselidiki.

Penelitian ini mengumpulkan data sekunder dari literatur yang relevan dengan menggunakan teknik analisis isi. Menurut (Ahmad, 2018) penelitian lapangan yang berkonsentrasi pada sumber primer tidak sama dengan analisis isi. Investigasi materi terhadap linguistik ini mengungkapkan tingkat interpretasi dan keaslian yang tinggi.

Untuk mengumpulkan data sekunder meliputi: melakukan tinjauan literatur, menelusuri internet untuk mencari artikel dan berita relevan tentang kebijakan relokasi pasar kota ke pasar wisata Bojonegoro, mengkategorikan data, dan menganalisis isinya. Dalam penelitian deskriptif kualitatif ini digunakan strategi berkompromi oleh Filley, House, dan Kerr sebagai pendekatan untuk menganalisis data.

Analisis data adalah proses mereduksi data, menyajikannya, dan menarik kesimpulan. Penulis mendalami lebih dalam mengenai konflik penolakan akibat kebijakan relokasi pasar kota ke pasar wisata Bojonegoro. Dalam konteks hubungan yang membangun jangka panjang, penelitian mengevaluasi perselisihan antara Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan para pedagang pasar kota melalui pendekatan transformasi konflik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik Kebijakan Relokasi Pasar Kota ke Pasar Wisata Kabupaten Bojonegoro

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memperhatikan pentingnya pelayanan yang baik kepada masyarakatnya terutama pedagang kaki lima di pasar kota agar merasa nyaman dan tertib dalam berdagang yaitu dengan mengambil kebijakan relokasi pasar kota Bojonegoro ke pasar wisata Bojonegoro. Dikarenakan kondisi Pasar Kota Bojonegoro yang sebelumnya mendapat kritikan dari masyarakat. Apalagi disaat musim hujan yang tidak teratur, membuat beberapa ruas jalan tertutup genangan air hujan. Pasar Kota Bojonegoro tampak dipenuhi genangan air akibat atap bocor dan hujan terus menerus seperti pada Gambar 1 di bawah ini. Keadaan ini menyebabkan para pedagang mengeluh hingga pembeli merasa kurang merasa nyaman dalam berbelanja.



Gambar 2 Keadaan Pasar Kota Bojonegoro Banjir Akibat Atap Bocor

Sumber : *Blokbojonegoro.com*

Sedangkan pasar Wisata ini dibuat untuk memenuhi tuntutan persaingan ekonomi rakyat di era modern, sehingga pasar tradisional (lokal) yang berstandar nasional diharapkan dapat bersaing dengan pasar modern/supermart/hypermart. Pasar Wisata, sebagai pusat perbelanjaan modern tempat berkumpulnya para pedagang dan pembeli, mewakili harapan

segar bagi para pedagang dan pelanggan saat mereka bermigrasi/transisi dari pasar kota ke pasar wisata. Karena Pasar Kota sudah ada sejak puluhan tahun dan juga ke arah tengah kota sekali, maka para pedagang di pasar tersebut direlokasikan ke Pasar Wisata.



Gambar 3 Pasar Wisata atau Tempat Relokasi Pedagang Pasar Kota

Sumber : Teropongdesa.com

Gambar 2 diatas merupakan lokasi baru untuk para pedagang pasar kota yang telah disiapkan Pemerintah Bojonegoro yang memiliki 2 lantai serta terdapat sekitar 1.700 toko dan stand. Dalam kebijakan relokasi tersebut, tentunya pemerintah mempertimbangkan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai agar lokasi baru tersebut dapat berkontribusi terhadap pembangunan perekonomian masyarakat. Di sisi lain, strategi relokasi ini merupakan sebuah langkah maju karena mampu menghilangkan permasalahan kemacetan lalu lintas di sepanjang kawasan pasar kota Bojonegoro.

Namun, hal tersebut memicu adanya konflik antara pemerintah kabupaten Bojonegoro dengan para pedagang yang berjualan di pasar kota sehingga menyebabkan ketegangan. Konflik antara pemerintah Bojonegoro dengan para pedagang muncul karena permasalahan sebagai berikut:

1. Pembangunan Pasar wisata tidak pernah disosialisasikan bahwa peruntukannya untuk pedagang pasar kota Bojonegoro

Pemerintah Bojonegoro sebelumnya tidak pernah memberikan sosialisasi terkait pembangunan pasar wisata tersebut diperuntukkan untuk pedagang. Sehingga kebijakan relokasi pedagang pasar kota menuai konflik, Jika dilihat dari kacamata sifat konfliknya, yaitu terdapat konflik ideologis dan pragmatis : (Novi Amalia, 2023)

- a) Konflik Ideologis muncul dari perbedaan pandangan nilai sejarah antara pasar kota dengan pasar tradisional lainnya di Bojonegoro. Pasar kota Bojonegoro adalah peninggalan sejarah yang tidak dapat dipisahkan karena berdiri sejak sepuluh tahun yang lalu.
- b) Konflik Pragmatis yang terkandung menunjukkan bahwa kebijakan relokasi pasar kota ke pasar wisata seharusnya dalam pelaksanaan idealnya pemerintah Bojonegoro melakukan sosialisasi terhadap pedagang pasar kota itu sendiri. Sosialisasi adalah bentuk tanggung jawab pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam mencari kata sepakat terkait dengan kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Upaya melaksanakan relokasi pasar kota Bojonegoro, sebaiknya Pemkab Bojonegoro menghubungi langsung para pedagang pasar tersebut. Konsep relokasi pasar Bojonegoro ke pasar wisata Bojonegoro merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten

Bojonegoro dengan para pedagang pasar kota Bojonegoro saat ini. Sosialisasi ini menunjukkan kewajiban Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk mencapai konsensus mengenai tujuan pembangunannya. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sejak awal tidak melakukan sosialisasi mengenai relokasi pasar kota Bojonegoro sehingga terkesan pemerintah mengabaikan para pedagang pasar kota Bojonegoro yang sudah ada. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik antara Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan pedagang pasar Kota Bojonegoro. Pertarungan tersebut kini telah meletus, dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh para pedagang pasar kota Bojonegoro. Pasar Kota Bojonegoro sendiri memiliki 1.285 pedagang yang menempati toko dan stand, ada lebih dari 400 pedagang lesehan sore dan malam serta sekitar 100 pedagang kaki lima dan pedagang Eks TBS

2. Pasar Wisata Bojonegoro tidak dirancang untuk pedagang pasar kota Bojonegoro.

Kementerian Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro telah berulang kali menyatakan dalam rapat mediasi dan pembicaraan di hadapan Komisi B DPRD Bojonegoro bahwa pasar kota Bojonegoro tidak akan dialihkan. (Agus Mujiono, 2022) Para pedagang pasar kota Bojonegoro tersebut menyampaikan pendapat melalui sosialisasi relokasi pasar kota Bojonegoro yang diundang oleh Sekretaris Daerah Dinas Koperasi Perdagangan dan Usaha Mikro untuk mengambil suara tentang siapa yang menerima untuk pindah dan siapa yang menolak untuk pindah. Dalam sosialisasi tersebut, para pedagang pasar di Kota Bojonegoro, pedagang lesehan sore dan malam, serta pedagang kaki lima bersatu menyatakan penolakan untuk direlokasi ke pasar wisata.

Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro bergantung pada keputusan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tentang pemindahan pedagang dari pasar kota Bojonegoro ke pasar wisata Bojonegoro. Mereka harus mendapat izin dari Dewan Perwakilan Rakyat Bojonegoro agar pemindahan tersebut tidak menimbulkan kesan bahwa DPRD Bojonegoro diabaikan atau keputusan diambil secara sepihak oleh Pemkab Bojonegoro. Pelaksananya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam mengambil keputusan kebijakan relokasi pasar kota Bojonegoro mengabaikan hak-hak para pedagang pasar kota Bojonegoro. Hak-hak pedagang pasar kota Bojonegoro dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang ada dimana pedagang pasar kota Bojonegoro wajib membeli toko dan lapak di pasar kota Bojonegoro, jadi cara mendapatkannya dengan cara membeli.

Para pedagang pasar kota Bojonegoro yang mempunyai toko dan lapak di pasar kota Bojonegoro berjumlah 1285 pedagang mempunyai hak milik berdasarkan perjanjian akta sewa beli sebagai bukti kepemilikan. Sehingga, jika Pemkab Bojonegoro mengabaikan akta sewa beli yang dimiliki pedagang pasar kota Bojonegoro, maka bisa terkena sanksi hukum. Apabila hak-hak pedagang pasar kota Bojonegoro dilanggar, maka setiap individu dan kelompok dapat meminta ganti rugi secara hukum melalui pengaduan perdata di pengadilan. (Hentty Kartika, 2023)

Selain mempertahankan haknya, para pedagang pasar Kota Bojonegoro juga turut memberikan kontribusi sosial, khususnya dengan melakukan upaya sosial yaitu bersinergi dengan masyarakat sekitar. Salah satu caranya adalah dengan mengungkapkan aspirasi secara terbuka atau melalui mobilisasi massa atau demo aksi damai yang dihadiri sekitar 1000 orang dengan sasaran penolakan relokasi pasar kota Bojonegoro. (Kabar Baru Bojonegoro., 2022)

Transformasi Konflik dalam Mencapai Perdamaian Konflik antara Pemerintah dengan Para Pedagang

Para pedagang yang mencari nafkah di pasar kota Bojonegoro percaya bahwa peralihan ke pasar wisata adalah bukan hal yang mudah. Prioritas utama dalam merelokasikan pasar kota adalah menyediakan fasilitas, keamanan dan lokasi yang strategis untuk menarik pelanggan sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman kepada para pedagang dan konsumen. Mempersiapkan relokasi tidak hanya memberikan lokasi baru bagi para pedagang pasar kota, namun juga memungkinkan mereka memperkuat perekonomian lokal.

Konflik pada hakikatnya adalah pertarungan menang-kalah antara kelompok atau individu dalam suatu organisasi yang mempunyai kepentingan yang bertentangan. Sehingga, konflik mengacu pada segala jenis perselisihan atau interaksi antarorganisasi yang melibatkan dua pihak atau lebih. Konflik kepentingan ini mempunyai kekuatan yang berbeda-beda tergantung pada metode yang digunakan. Masing-masing pihak bertujuan untuk mempertahankan prinsip mereka dan memaksa pihak lawan untuk menerimanya, baik melalui cara yang halus maupun keras. (Juliana Lumintang, 2015) Konflik dapat diartikan sebagai pertentangan antara dua pihak atau lebih, baik secara individu maupun kelompok dimana pada umumnya muncul karena perbedaan nilai, pandangan, kegiatan, dan kelangkaan sumber daya alam. (Komunika, 2023)

Strategi dasar dalam mengurangi konflik menurut Filley, House dan Kerr dalam berkompromi ada 3 yaitu kalah-kalah, menang-kalah, dan menang-menang. Pendekatan kalah-kalah menurut Filley, House dan Kerr mengambil beberapa pendekatan yakni dengan kompromi dengan pihak yang bersangkutan, penyuaian dengan membayar salah satu pihak, dan pendekatan yang dimediasi oleh wasit (Cecep S, Saifuddin Z, 2022)

Menang-kalah adalah cara paling umum untuk menyelesaikan perselisihan masyarakat dalam budaya kompetitif. Pada umumnya saat berada di situasi ini salah satu pihak yang terlibat dalam konflik berusaha menyusun rencana dan menyatukan kekuatannya untuk menang agar pihak lain akan kalah.

Menang-menang adalah salah satu taktik yang paling diinginkan dari sudut pandang organisasi. Teknik ini menggabungkan aspek-aspek berbeda dari fungsional menang-kalah sekaligus menghilangkan banyak elemen disfungsional. Menurut Filley, House, dan Kerr, beragam keputusan strategis yang saling menguntungkan terkait dengan kebijakan yang kuat, pengalaman organisasi yang menguntungkan, dan negosiasi yang lebih baik. Dengan demikian, cara ini menjadi tujuan utama dalam pengelolaan konflik.

Strategi ini menerapkan teknik *problem solving* dan dianggap sebagai pilihan terbaik karena tidak menimbulkan dampak buruk. Kolaborasi adalah metode penyelesaian konflik yang efektif ketika hasil proyek sangat penting untuk dikompromikan. Hal ini memerlukan pengumpulan berbagai ide dan perspektif dari individu-individu dengan latar belakang yang beragam. Kolaborasi memberikan peluang berharga untuk belajar dari orang lain. Partisipasi aktif kedua belah pihak dalam pengambilan keputusan akan memfasilitasi konsensus dan komitmen. Kolaborasi tidak efektif bila hanya ada sedikit orang yang terlibat dan sudut pendapat mereka eksklusif.

Untuk menyikapi transformasi konflik antara pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan para pedagang, kini kedua belah pihak melakukan kerja sama dan menjalin komunikasi yang efektif untuk menjalin hubungan positif dan mengomunikasikan tujuan kebijakan relokasi pasar kepada seluruh pedagang pasar kota. Selain itu dengan memberikan bantuan dalam menciptakan keamanan dan ketertiban serta pelatihan kepada pedagang agar meningkatkan keterampilan mereka. Yakni pelatihan pemasaran yang biasanya masih bersifat tradisional dan belum memanfaatkan teknologi. Saat ini Pemerintah Bojonegoro akan memulai mengembangkan pemasaran dalam pemanfaatan teknologi di Pasar Wisata.

Pasar tersebut telah menciptakan sebuah aplikasi yang akan mempermudah pedagang dan pembeli. Namun pengembangan aplikasi masih bersifat etalase dan perlu ditransformasikan menjadi sebuah *marketplace* sehingga Pasar Wisata dapat menggelar lapak secara virtual dalam jangka panjang. Untuk mendorong pedagang pasar kota beralih ke penjualan online, pemerintah harus memberikan dukungan yang memberikan pengaruh menguntungkan bagi usaha mereka.

Pada tahap awal implementasi program relokasi pasar, memang terjadi penolakan dari para pedagang pasar kota terhadap kebijakan tersebut. Hal ini menyebabkan mereka melakukan demonstrasi menentang pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Upaya penertiban oleh polisi, Satpol PP, dan aparat lainnya harus dilakukan dengan meminimalkan risiko kekerasan selama aksi unjuk rasa. Meskipun kebijakan relokasi pasar kota ke pasar wisata telah menghasilkan beberapa perubahan pada pola pembelian pelanggan awalnya, hal tersebut juga berdampak pada penurunan jumlah pedagang. (Novianti dkk, 2023)

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terlibat dalam keterlibatan yang luas dan kontak informal dengan para pedagang untuk memastikan bahwa kebijakan relokasi pasar kota ke pasar wisata dikomunikasikan dengan baik dan lebih efektif, dan bahwa para pedagang menerimanya. Selain itu, pemberian pelatihan, pendampingan, dan pembinaan dalam manajemen perusahaan dapat membantu para pedagang mengembangkan bakatnya. Dalam transformasi konflik dan memenuhi kebutuhan para pedagang guna mencapai resolusi konflik dan perdamaian antara pemerintah dan pedagang pasar kota. Konflik tersebut mengupayakan menghasilkan menang-menang secara jangka panjang.

Pada tanggal 8 Juli 2023 pukul 14.40 di aula Bakesbangpol Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengadakan pertemuan dan di hadiri 50 pedagang pasar kota. (Radar Bojonegoro, 2023) Adanya pertemuan ini adalah upaya menjalin komunikasi yang lebih dekat dengan mengadakan dialog intensif dan membangun komunikasi secara informal dengan pihak pedagang untuk memastikan kebijakan relokasi pasar kota ke pasar wisata ini tujuannya dapat tersampaikan dengan baik dan jelas agar dapat di terima oleh para pedagang.

Selain itu komponen keterlibatan yang menggerakkan terjadinya kolaborasi yang melibatkan pedagang kaki lima dan masyarakat yakni patroli rutin dan aduan masyarakat ke Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro. Serta pemerintah Bojonegoro yang mengadakan pelatihan pemasaran, dikarenakan pasar tersebut telah mengembangkan sebuah aplikasi yang akan mempermudah pedagang dan pembeli. Pelatihan ini akan membantu meningkatkan keterampilan para pedagang. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bupati Bojonegoro Anna Mu'Awana bahwa pasar wisata ini kedepannya juga akan didukung dengan aplikasi pesan antar barang untuk memudahkan pembeli yang ingin berbelanja. Produk-produk unggulan UKM dan IKM kerajinan khas Bojonegoro diharapkan akan menjadi penambah daya tarik pasar wisata Bojonegoro menjadi ikon baru Kabupaten ini. (Pemkab Bojonegoro, 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sukaemi, selaku Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Bojonegoro mengungkapkan, sebanyak 720 pedagang pasar kota yang belum memiliki lapak telah mendaftar di Pasar Wisata, dimana pengundian stand saat itu dilakukan pada tanggal 2 Januari 2023. Mengingat kapasitas pasar wisata sebanyak 1.716 yang mencakup 206 tempat usaha dan 1.510 stand, batas pendaftaran dan pengundian hingga 7 Januari 2023.

Pada akhirnya, sesuai yang direncanakan yaitu tanggal 10 Januari 2023 para pedagang mulai beralih ke pasar wisata. Pada saat yang sama, para pedagang menempati standnya masing-masing. Selama tiga bulan, baik pedagang maupun pembeli akan mendapatkan sewa booth dan parkir gratis. Hal ini dilakukan untuk meringankan beban perekonomian dan mengembalikan iuran para pedagang. Pada bulan keempat, barulah sewa dibayar. (Pemkab Bojonegoro, 2023)



Gambar 4

Pasar Wisata 24 Jam Ramai Pengunjung

Sumber: Kabar1news.com

Sesuai Gambar 3 bagaimana wajah baru dari Pasar Wisata Bojonegoro saat ini yang dapat membuat penjual maupun pembeli bisa merasakan kenyamanan saat berbelanja, dan para pedagang juga melaporkan bahwa keuntungan yang mereka peroleh tumbuh hingga 50% dibandingkan sebelumnya. Karena pasar wisata Bojonegoro buka selama 24 jam, sehingga peluang dan pendapatan pedagang tentu akan meningkat. Para pedagang senang karena memiliki tempat yang bagus dan aman dari cuaca buruk sehingga berdampak positif terhadap pendapatan penjualan mereka.

Disisi lain, adanya media digital atau aplikasi yang dikembangkan menjadi solusi marketing untuk memperluas produk usahanya serta memudahkan menghubungkan penjual dengan pembeli. Tidak sedikit pedagang dan banyak yang berterima kasih kepada Pemerintah kabupaten Bojonegoro yang telah memberikan fasilitas berjualan yang nyaman dan strategis dipusat kota dengan fasilitas listrik yang gratis dan bebas pajak. Berbelanja menjadi lebih nyaman tanpa merasa panas maupun becek saat musim hujan. (Rofiq, A, 2023) Dengan hal ini, tujuan dari kebijakan terealisasi dengan baik.

KESIMPULAN

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang telah melakukan sosialisasi terkait relokasi pasar kota Bojonegoro ke pasar wisata Bojonegoro memperkirakan masyarakat yang akan menghuninya adalah pedagang pasar kota Bojonegoro, pedagang lesehan sore dan malam, serta pedagang kaki lima. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Koperasi Perdagangan dan Usaha Mikro telah menetapkan tanggal pemindahan yang meliputi peresmian, pengundian, pemindahan, dan penempatan pasar wisata.

Namun, relokasi pedagang pasar kota ke pasar wisata Bojonegoro menuai berbagai reaksi penolakan, sehingga pemerintah memfokuskan upayanya untuk mengubah perselisihan dari negatif menjadi konstruktif. Tujuannya adalah untuk membina kerja sama antara pemerintah dan pedagang pasar kota dengan melibatkan mereka dalam semua tahapan pengambilan keputusan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.

Dengan mengalihkan pasar kota ke pasar wisata, pemerintah dapat berkolaborasi dengan menjalin komunikasi yang intens serta memberikan bantuan dan pelatihan kepada pedagang, sehingga meningkatkan taraf hidup ekonomi mereka. Oleh sebab itu, semua pihak terkait yang terlibat dalam kebijakan pengalihan pedagang pasar kota ke pasar wisata sepakat bahwa menggunakan metode transformasi konflik untuk menyelesaikan konflik adalah teknik terbaik untuk mencapai hubungan yang sehat dan bernilai antara pemerintah dan pedagang.

REFERENSI

- Agus Mujiono. (2022). Mengurai Langkah Pemkab Bojonegoro Terkait Pemindahan Pasar Kota . *Artikel*.
- Agus Mujiono. (2022). Mengurai Langkah Pemkab Bojonegoro Terkait Pemindahan Pasar Kota . *Artikel*.
- Ahmad. (2018). Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis). *Research Gat*, 5(9).
- Anastasia N, A Dkk. (2013). Upaya Transformasi Konflik Oleh Search For Common Ground Organization. *Dikshi*, 1(3), 1-15.
- Cecep S, Saifuddin Z. (2022). Manajemen Konflik Dalam Peningkatan Kinerja Guru Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Kependidikan Islam*, 3(2), 92.
- Eka Septian. (2022). Transformasi Konflik Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(3), 331.
- Hentty Kartika. (2023). Belum Sepakat Soal Pemindahan Pasar Tradisional, Para Pedagang Di Bojonegoro Laporkan Polisi. *Artikel*.
- Juliana Lumintang. (2015). Dinamika Konflik Dalam Organisasi. *Jurnal Acta Diurna Komunikasi*, 4(2).
- Kabar Baru Bojonegoro. (2022). Tolak Relokasi, Pedagang Pasar Bojonegoro Demo Besar-Besaran. *Artikel*.
- Kadji. (2016). *Metode Penelitian Ilmu Administrasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Manzanaris, M. R. (2018). Dampak Kebijakan Relokasi Pasar Tradisional Rawajaya Di Wilayah Kota Tobelo Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(52).
- Neuman. (2017). *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*. Jakarta: Indeks.
- Novi Amalia. (2023). Resolusi Konflik: Analisis Konflik Pragmatis. *Artikel*.
- Novianti Dkk. (2023). Public Values Kebijakan Relokasi Pasar Kota Bojonegoro. *Jurnal Religion Education Social Laa Roiba*, 6(3), 2084-2094.
- Pemendagri. (2017). Tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional. *Perundang-Undangan*.
- Pemkab Bojonegoro. (2021). Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pasar Rakyat, Toko Swalayan Dan Pusat Perbelanjaan.
- Pemkab Bojonegoro. (2023). Pengundian Stan Dimulai, Tanggal 10 Januari Pedagang Tempati Pasar Wisata Bojonegoro. *Artikel*.
- Radar Bojonegoro. (2022). Pedagang Pasar Kota Bojonegoro Bertemu Pemkab, Adu Gagasan, Perlu Dibentuk Tim Titik Temu. *Artikel*.
- Rofiq, A. (2023). Pedagang Pasar Wisata Bojonegoro Nikmati Fasilitas & Pendapatan Naik. *Artikel*.
- Siska Perbapo. (2022). Profil Pasar Wisata Kabupaten Bojonegoro. *Artikel*.
- Sugiyanto. (2009). Dampak Keberadaan Pasar Modern Terhadap Pedagang Pasar Tradisional. *Die: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Manajemen*, 5(4), 97-115.
- Sukmana & Safitri. (2010). Analisis Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Sentra Kuliner Gajah Mada Sidoarjo. *Indonesian Journal Of Public*, 1-11.
- Weng & Kim. (2016). The Critical Role Of Street Vendor Organizations In Relocating Street Vendors Into Public Markets: Case Of Hsinchu City, Taiwan. *Cityscape*, 18(1), 47-70.
- Zamahsari, A. (2017). Resolusi Konflik Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Pasar Tanah Abang Provinsi Dki Jakarta. *Jurnal Prodi Damai Dan Resolusi Konflik*, 3(2), 18-24.